

Stabilitas Anggaran vs. Kualitas Pekerjaan: Mengkaji Kembali Arah Kebijakan Fiskal Indonesia 2025

Alifah Andriani

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i></p> <p>Field Research (November)</p>	<p>Dilema kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 yang dihadapkan pada ketegangan antara upaya menjaga stabilitas anggaran dan urgensi perbaikan kualitas ketenagakerjaan. Meskipun pemerintah berhasil mengendalikan defisit anggaran dalam rentang 2,45%-2,82% PDB, perekonomian nasional masih menghadapi tantangan besar berupa fenomena <i>jobless growth</i>, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta orang, dengan mayoritas lapangan kerja baru tercipta di sektor informal yang minim perlindungan sosial. Analisis dalam tulisan ini menyoroti bahwa belanja negara belum sepenuhnya efektif mengalir ke sektor produktif, sehingga terjadi kesenjangan antara stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan riil masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan fiskal yang memprioritaskan sektor padat karya, penguatan UMKM, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk mengatasi masalah <i>job mismatch</i> serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Kebijakan Fiskal, Stabilitas Anggaran, Pengangguran, Jobless Growth, Kualitas Pekerjaan</i></p>	
<p><i>Editor:</i></p> <p>Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

PENDAHULUAN

Pengangguran masih menjadi persoalan besar yang menekan perekonomian Indonesia dan memicu berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum berhasil memperoleh pekerjaan meskipun terus berusaha memasuki pasar kerja. Situasi tersebut semakin rumit karena pertumbuhan ekonomi tidak diikuti peningkatan serapan tenaga kerja, sehingga muncul fenomena *jobless growth* yang menunjukkan ketidakseimbangan antara laju ekonomi dan kemampuan pasar kerja menampung tenaga kerja (Minda Surelvi, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berusaha menjaga kondisi keuangan negara tetap stabil meskipun tekanan ekonomi global dan melemahnya kegiatan produksi di dalam negeri terus terjadi. Memasuki tahun 2025, pemerintah memperkirakan defisit anggaran berada pada rentang 2,45% - 2,82% dari PDB, dengan rasio utang sekitar 38% (Kurniati, 2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa angka tersebut diupayakan tetap terkendali agar keuangan negara tetap kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia.

Kondisi fiskal yang terkendali tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan situasi ketenagakerjaan nasional. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, atau 4,76% dari total angkatan kerja (Mahadewi, 2025). Jumlah tersebut meningkat sekitar 83 ribu orang dibandingkan Februari 2024 yang berjumlah 7,20 juta orang. Menariknya, meskipun jumlah pengangguran bertambah, tingkat pengangguran terbuka justru turun sedikit dari 4,82% menjadi 4,76%, yang menunjukkan adanya perubahan komposisi angkatan kerja yang tidak sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi nyata di lapangan (BPS, 2025).

Meningkatnya angka pengangguran saat pemerintah berusaha menjaga stabilitas fiskal memunculkan keraguan tentang seberapa efektif kebijakan anggaran yang dijalankan. Belanja negara yang seharusnya mendorong aktivitas ekonomi dan membuka lebih banyak peluang kerja ternyata belum memberikan hasil yang kuat (Supriyanto, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal belum benar-benar mengalir ke sektor yang mampu menciptakan pekerjaan yang lebih produktif. Selain itu, pertumbuhan lapangan kerja dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh pekerjaan berupah rendah dan sektor informal (Minda Surelvi, 2025). Situasi ini membuat kualitas pekerjaan menjadi perhatian penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. Ketergantungan pada pekerjaan informal juga membuat banyak pekerja tidak memiliki kepastian pendapatan, perlindungan sosial, atau peluang untuk meningkatkan kondisi ekonominya. Ketidakseimbangan antara stabilitas anggaran dan kondisi pasar kerja menunjukkan bahwa penentuan prioritas dalam kebijakan fiskal masih bermasalah (Josua Logo Buke, 2025).

Pemerintah terus menekankan pentingnya menjaga defisit tetap rendah, sementara kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pekerjaan yang layak semakin mendesak. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal masih dihadapkan pada dilema antara mempertahankan disiplin anggaran dan mempercepat pemulihan tenaga kerja. Kebijakan fiskal yang mampu mendukung penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama. Aspek efisiensi, keadilan dalam distribusi anggaran, dan prioritas pada sektor yang dapat menyerap tenaga kerja menjadi kunci untuk menilai seberapa efektif kebijakan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan kondisi ketenagakerjaan penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi Indonesia pada tahun 2025.

PEMBAHASAN

Upaya menjaga stabilitas anggaran pada 2025 menghadapi hambatan karena penerimaan negara, terutama dari pajak, mengalami perlambatan. Laporan Kementerian Keuangan yang dikutip CNBC Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada awal 2025 turun cukup besar sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan belanja yang bersifat produktif (CNBC, 2025). Kondisi ini membuat kebijakan fiskal sulit diarahkan secara optimal untuk mendorong lahirnya pekerjaan yang berkualitas, khususnya di sektor formal yang membutuhkan dukungan insentif dan pembiayaan. Ketika kemampuan fiskal melemah, program penciptaan kerja berjalan kurang maksimal dan kesenjangan antara stabilitas anggaran dan serapan tenaga kerja menjadi semakin jelas.

Pemerintah mengklaim telah menciptakan jutaan pekerjaan baru, tetapi berbagai laporan menunjukkan sebagian besar pekerjaan masih berada di sektor dengan upah rendah dan perlindungan sosial yang terbatas. CNBC Indonesia menyebutkan banyak lulusan perguruan tinggi dan pekerja terampil belum terserap secara optimal karena pertumbuhan sektor formal belum sejalan dengan perkembangan ekonomi (Pinardi, 2025). Hal ini menunjukkan masalah utama bukan hanya jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutannya. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor produksi semakin memperparah fenomena *job mismatch*, yang akhirnya menghambat kesejahteraan pekerja. Ketidakpastian ekonomi baik di dalam maupun luar negeri memengaruhi pasar tenaga kerja. Tempo melaporkan bahwa perlambatan produksi di beberapa sektor membuat perusahaan menunda ekspansi dan perekrutan (Nefi, 2025). Beberapa perusahaan bahkan melakukan efisiensi karena permintaan menurun dan biaya operasional meningkat. Kondisi ini menghambat terciptanya pekerjaan berkualitas, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan beralih ke sektor informal. Ketidakpastian yang berlangsung lama menunjukkan bahwa stabilitas fiskal makro tidak selalu menjamin stabilitas ketenagakerjaan di tingkat individu.

Dalam menghadapi ketegangan antara disiplin fiskal dan tuntutan penciptaan pekerjaan, prinsip keadilan distribusi menjadi semakin penting. Beberapa ekonom menilai bahwa anggaran masih terlalu banyak digunakan untuk belanja rutin dan belum sepenuhnya difokuskan pada program padat karya, penguatan UMKM, atau peningkatan keterampilan tenaga kerja. Laporan terbaru menyebutkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari stabilnya defisit, tetapi juga dari seberapa baik anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (Simamora, 2025). Dengan orientasi fiskal yang lebih mendukung kelompok rentan, pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif dan kualitas pekerjaan meningkat secara bertahap.

PENUTUP

Berdasarkan kondisi yang terjadi, meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas fiskal, hal ini belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan jumlah maupun kualitas pekerjaan. Banyak pekerjaan yang tercipta berada di sektor dengan upah rendah dan perlindungan sosial terbatas, sementara pertumbuhan sektor formal belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Ketidakseimbangan ini menegaskan adanya kesenjangan antara stabilitas anggaran dan kondisi nyata di pasar tenaga kerja. Fenomena ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pekerjaan (job mismatch), dominasi pekerjaan informal, serta ketidakpastian ekonomi menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung terciptanya pekerjaan berkualitas. Efektivitas anggaran tidak hanya dilihat dari terkendalinya defisit, tetapi juga dari sejauh mana anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Kondisi ini menuntut perencanaan fiskal yang lebih tepat, dengan fokus pada sektor padat karya dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali pembagian anggaran agar lebih mendukung program yang mampu menciptakan pekerjaan produktif, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat agar anggaran digunakan secara tepat, terutama untuk kelompok masyarakat yang rentan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan, memperluas kesempatan kerja formal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

REFERENSI

- BPS. (2025, May 5). Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Global. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/assets/news/2025/05/05/703/ekonomi-indonesia-tetap-tumbuh-di-tengah-ketidakpastian-global.html>
- CNBC. (2025, March 13). Penerimaan Pajak Babak Belur di Awal Tahun, Ini Datanya! Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250313112156-128-618244/penerimaan-pajak-babak-belur-di-awal-tahun-ini-datanya>
- Josua Logo Buke, A. E. (2025). Ekonomi Indonesia Mengatasi Tantangan, Menjaga Stabilitas. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 965-970.
- Kurniati, D. (2024, Mei 20). Sri Mulyani Rancang Defisit APBN 2025 di Rentang 2,45–2,82 Persen PDB. Diambil kembali dari DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802738/sri-mulyani-rancang-defisit-apbn-2025-di-rentang-245-282-persen-pdb>
- Mahadewi, M. P. (2025, July 19). BPS Sebut Tingkat Pengangguran Terbuka Sentuh 4,76 Persen. Indikator Lain? Diambil kembali dari TEMPO: <https://www.tempo.co/ekonomi/bps-sebut-tingkat-pengangguran-terbuka-sentuh-4-76-persen-indikator-lain--2045796>
- Minda Surelvi, U. U. (2025). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. (MedREP): *Media Riset Ekonomi Pembangunan*, 904-913.
- Nefi, A. (2025, July 20). BI Sebut Industri Pengolahan Masih Ekspansi tapi Menurun. Diambil kembali dari TEMPO: <https://www.tempo.co/ekonomi/bi-sebut-industri-pengolahan-masih-ekspansi-tapi-menurun-2048869>
- Pinardi, K. (2025, October 1). Target Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Penurunan Pengangguran Sarjana. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250930134854-14-671540/target-pertumbuhan-ekonomi-8-dan-penurunan-pengangguran-sarjana>
- Simamora, N. (2025, August 16). Dukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemerintah Alokasikan Rp 1.376 Triliun. Diambil kembali dari KONTAN.CO.ID: <https://nasional.kontan.co.id/news/dukung-masyarakat-berpenghasilan-rendah-pemerintah-alokasikan-rp-1376-triliun>
- Supriyanto, B. E. (2025, February 20). Efektivitas Belanja Negara dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Diambil kembali dari DJPb Kemenkeu: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3827-efektivitas-belanja-negara-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi.html>

Efektivitas Kebijakan Fiskal Counter-Cyclical dalam Menjaga Stabilitas Fiskal di Tengah Tingginya Tingkat Pengangguran

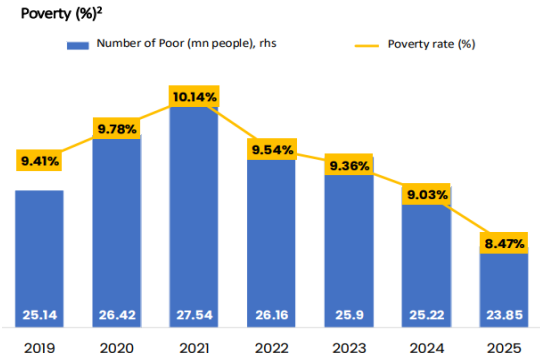
Shofi Shidqiyah

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i></p> <p>Field Research (November)</p>	<p>Efektivitas kebijakan fiskal <i>counter-cyclical</i> sebagai strategi utama dalam mengatasi masalah pengangguran struktural di Indonesia yang mencapai tingkat 4,85% pada Agustus 2025. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah menghadapi dilema antara kebutuhan ekspansi belanja untuk menciptakan lapangan kerja dan kewajiban menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Studi ini menyoroti bahwa alokasi belanja publik yang terarah pada sektor produktif, infrastruktur dasar, dan padat karya mampu menciptakan efek pengganda (<i>multiplier effect</i>) yang tinggi, sehingga efektif mempertahankan daya beli masyarakat serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Tulisan ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan <i>counter-cyclical</i> yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>) dan akuntabel tidak hanya berfungsi sebagai stimulus ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Kebijakan Fiskal Counter-Cyclical, Stabilitas Fiskal, Tingkat Pengangguran Terbuka, Belanja Publik</i></p>	
<p><i>Editor:</i></p> <p>Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan di Indonesia, meskipun secara angka tidak menunjukkan perubahan drastis dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 berada pada kisaran 4,85 persen, atau setara dengan sekitar 7,46 juta jiwa (BPS, 2025a). Pada saat yang sama, jumlah angkatan kerja mencapai 154,00 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,59 persen (BPS, 2025b). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa sebagian penduduk usia produktif belum memperoleh kesempatan kerja yang sesuai, sehingga proses pemulihan pasar tenaga kerja masih berjalan lambat.



Situasi tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kondisi kemiskinan nasional. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total populasi (BPS, 2025c).

Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, peningkatan kesejahteraan belum merata karena sebagian besar masyarakat miskin masih bertumpu pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan upah yang rendah. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan menjadi kunci dalam memperkuat kesejahteraan sosial serta mengurangi kerentanan ekonomi kelompok rentan. Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam menyusun strategi pemulihan ekonomi akibat keterbatasan ruang fiskal. Belanja publik memegang peranan penting dalam mempercepat aktivitas ekonomi, tetapi peningkatan belanja secara agresif berpotensi memperlebar defisit dan mengancam stabilitas APBN dalam jangka panjang (Kementerian Keuangan, 2025). Dilema ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit, antara kebutuhan ekspansi belanja untuk menciptakan lapangan kerja dan keharusan menjaga keberlanjutan fiskal.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan fiskal *counter-cyclical* menjadi instrumen yang relevan untuk merespons perlambatan ekonomi. Dorongan belanja pemerintah pada sektor padat karya, pembangunan infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial diyakini dapat mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan kinerja sektor riil, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Langkah tersebut mampu mempercepat pemulihan pasar tenaga kerja tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dinamika ekonomi global. Urgensi strategi tersebut semakin menguat ketika mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global, volatilitas harga komoditas, serta ketidakseimbangan penyerapan tenaga kerja antardaerah. Penguatan pengelolaan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai pilar ketahanan sosial dalam jangka panjang. Hubungan antara stabilitas fiskal dan pasar tenaga kerja saling memengaruhi: tingginya pengangguran berpotensi menurunkan penerimaan negara, sementara lemahnya kondisi fiskal dapat membatasi kemampuan pemerintah menciptakan peluang kerja baru.

Berdasarkan dinamika tersebut, hal ini menekankan bahwa belanja publik melalui pendekatan *counter-cyclical* memiliki potensi besar untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja selama kebijakan dijalankan secara tepat sasaran, produktif, dan akuntabel. Dampak positifnya menjadi maksimal apabila komposisi belanja diarahkan pada sektor-sektor produktif dan tata kelola fiskal mampu menjaga keseimbangan antara percepatan pemulihan ekonomi dan keberlanjutan APBN.

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Realisasi APBN 2025 menunjukkan defisit yang relatif terkendali, tetapi dorongan belanja publik yang terlalu agresif berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang (Kementerian Keuangan, 2025). Situasi ini menciptakan dilema klasik antara memperluas belanja untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga keseimbangan APBN agar tetap stabil. Sari et al. (2024) menekankan bahwa alokasi belanja yang tepat pada sektor produktif dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, namun tanpa pengelolaan fiskal yang prudent, risiko defisit tetap mengintai kemampuan pemerintah di masa depan. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya tergantung pada besaran belanja, tetapi juga pada strategi alokasi dan manajemen risiko fiskal yang cermat.

Kebijakan fiskal *counter-cyclical* muncul sebagai instrumen strategis untuk merespons perlambatan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Hartanti et al. (2024) menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor padat karya dan program perlindungan sosial efektif mempertahankan daya beli masyarakat serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, strategi ini menghadirkan efek ganda: mendorong pertumbuhan makro sekaligus mengurangi kerentanan sosial kelompok yang paling terdampak fluktuasi ekonomi. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan *counter-cyclical* sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menargetkan belanja pada sektor-sektor dengan efek pengganda tinggi (*high multiplier*), sehingga dampak terhadap pasar tenaga kerja dapat optimal.

Pelaksanaan kebijakan *counter-cyclical* harus selektif dan berbasis data agar alokasi belanja tepat sasaran. Setiowati dan Nugroho (2024) menekankan bahwa belanja publik yang difokuskan pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan subsidi sosial mampu meningkatkan kesempatan kerja secara signifikan di berbagai daerah. Pendekatan ini juga menciptakan efek *multiplier* yang memperkuat sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata. Dari perspektif analisis ekonomi, alokasi yang terencana dengan baik tidak hanya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi domestik agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Jika Data APBN 2025 menunjukkan alokasi signifikan untuk program infrastruktur dan padat karya, yang dirancang khusus untuk mempercepat pemulihan pasar tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran struktural (Kementerian Keuangan, 2025). Hal ini menegaskan bahwa belanja publik tidak sekadar menjadi stimulus jangka pendek, tetapi juga merupakan investasi sosial untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa penempatan anggaran pada sektor produktif yang tepat sasaran mampu mengurangi ketimpangan wilayah dan mendukung pertumbuhan inklusif, sehingga efek positif kebijakan fiskal dapat dirasakan lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Hubungan antara stabilitas fiskal dan kondisi pasar tenaga kerja bersifat timbal balik. Tingginya tingkat pengangguran menekan penerimaan negara melalui penurunan pajak dan kontribusi sosial, sementara defisit fiskal yang membesar membatasi kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja baru (BPS, 2025a; BPS, 2025b). Sari et al. (2024) menekankan bahwa pengelolaan fiskal yang efektif menjadi landasan bagi penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, stabilitas fiskal bukan hanya instrumen makroekonomi, tetapi juga faktor determinan bagi kesejahteraan sosial jangka panjang.

Efektivitas kebijakan counter-cyclical sangat tergantung pada akuntabilitas dan monitoring belanja publik. Risiko alokasi yang tidak tepat, ketimpangan antarwilayah, dan ketidakpastian ekonomi global dapat menurunkan dampak positif kebijakan (Hartanti et al., 2024). Analisis mendalam menunjukkan bahwa evaluasi yang konsisten, transparansi, dan akuntabilitas fiskal menjadi prasyarat agar setiap rupiah belanja publik memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Optimalisasi belanja publik melalui kebijakan counter-cyclical menekankan sinergi dengan sektor swasta, peningkatan efisiensi administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Alokasi prioritas pada sektor produktif, pendidikan, dan padat karya dapat mendorong pertumbuhan inklusif sekaligus memperkuat ketahanan sosial (Setiowati & Nugroho, 2024). Analisis ini menunjukkan bahwa fiskal counter-cyclical yang dirancang secara strategis mampu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan stabilitas jangka panjang, sehingga menjadi instrumen yang efektif untuk menghadapi tantangan pengangguran struktural.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal counter-cyclical berperan ganda sebagai alat stabilisasi jangka pendek dan pilar ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang (Hartanti et al., 2024). Strategi ini memungkinkan pemerintah merespons perlambatan ekonomi dengan tepat sasaran, menjaga daya beli masyarakat, serta menciptakan kesempatan kerja produktif. Dengan pengelolaan fiskal yang prudent, kebijakan ini mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan APBN, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, dan mengurangi kerentanan sosial akibat tingginya tingkat pengangguran.

PENUTUP

Kebijakan fiskal counter-cyclical memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Belanja publik yang dijalankan secara tepat sasaran, produktif, dan akuntabel terbukti mampu memperkuat daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor riil, dan menurunkan tingkat pengangguran struktural. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada alokasi belanja yang fokus pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan sektor padat karya, serta pengelolaan fiskal yang prudent.

Hubungan antara stabilitas fiskal dan kondisi pasar tenaga kerja bersifat timbal balik, di mana pengelolaan fiskal yang efektif mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan APBN. Risiko alokasi yang tidak tepat, ketimpangan regional, dan ketidakpastian ekonomi global dapat mengurangi dampak positif kebijakan, sehingga mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting.

Dengan strategi counter-cyclical yang tepat, belanja publik tidak hanya berfungsi sebagai stimulus ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai pilar ketahanan sosial dan ekonomi jangka panjang. Implementasi kebijakan fiskal counter-cyclical yang efektif dapat menjadi instrumen yang seimbang, mampu mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga keberlanjutan APBN, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

PENUTUP

- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2025*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-85-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 (Publikasi)*. BPS. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=5gFrz8XCqhCNx915GpkL7XdnYmk4TVpIbWhZOUw0Y2IESINPcWVKM2xHVzVleDFYMHJJQk1FS3pzSHRWeEw4ZXZibUR4T1NaK0JQM0Nva3NBcFJ4S2JWNGRzeGFMeitVN3Z2QkhnWFVFa1ZiVTlOYXdXcnlXTU5QcjIFUWNTVnJzWGO0Q01UV1FHZE4rb1NOQ0RYNHhWMG5hOWtCRWRzMIVEZ0pWUT09>
- Badan Pusat Statistik. (2025c). *Profil kemiskinan di Indonesia tahun 2025*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>
- Hartanti, A., Basriwijaya, A. D., & Munthe, H. V. (2024). Analisis kebijakan fiskal terhadap tingkat pengangguran terbuka akibat perubahan inflasi di Indonesia 2019–2023. *Jurnal Neraca*, 12(2), 45–63. <https://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/462>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025: Kinerja dan fakta — Stabilitas fiskal dan pemulihan ekonomi nasional*. Kemenkeu RI. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf>
- Sari, F. M., dkk. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 10(3), 34–50. <https://doi.org/10.47134/jcae.v1i4.231>
- Setiowati, T. A. H., & Nugroho, R. Y. (2024). Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 78–95. <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.205>

Pendekatan Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Ketimpangan di Tengah Defisit Fiskal

Almar Atus Sholikh Merisang Dewi

KSEI LiEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i></p> <p>Give Your Opinion (November)</p>	<p>Paradoks ekonomi Indonesia pada tahun 2025, di mana keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi dengan defisit anggaran sebesar 2,02% dari PDB belum diikuti oleh perbaikan signifikan dalam kualitas ketenagakerjaan. Meskipun tingkat pengangguran berada di angka 4,76%, perekonomian masih didominasi oleh fenomena penciptaan lapangan kerja berupa rendah dan tingginya persentase pekerja di sektor informal. Studi ini mengkritisi efektivitas kebijakan fiskal yang hanya berfokus pada stabilitas anggaran dan menawarkan pendekatan ekonomi syariah sebagai solusi alternatif untuk mengatasi ketimpangan. Integrasi instrumen syariah seperti zakat, sedekah, dan wakaf dalam sistem fiskal nasional diusulkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Sinergi antara kebijakan fiskal dan pemberdayaan ekonomi syariah diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kapasitas sektor informal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Kebijakan Fiskal, Ekonomi Syariah, Pengangguran, Ketimpangan Ekonomi, Sektor Informal</i></p>	
<p><i>Editor:</i></p> <p>Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

PENDAHULUAN

Pada tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir Oktober 2025 mencapai Rp 479,7 triliun, atau 2,02% dari PDB,. Ini lebih besar dari defisit bulan sebelumnya, yang berjumlah Rp 371,5 triliun, atau 1,56% dari PDB (CNBC Indonesia, 2025). Di samping itu, Indonesia masih memegang rasio utang yang cukup tinggi, yaitu sekitar 38% (CNBC Indonesia, 2025), yang mencerminkan beban ekonomi yang harus ditangani dalam kebijakan fiskal nasional. Meskipun pemerintah menaruh perhatian serius pada pengelolaan anggaran, tingkat pengangguran di Indonesia masih terbilang tinggi. Menurut laporan (Trading economics, 2025) tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76% atau sekitar 7,28 juta orang. Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja baru telah mencapai 3,59 juta, namun sebagian besar merupakan pekerjaan dengan upah rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun tingkat pengangguran menurun, hampir 60% pekerja masih berada di sektor informal yang biasanya memiliki upah dan perlindungan yang rendah. Selain itu, stagnasi pertumbuhan upah riil selama bertahun-tahun menandakan tidak adanya perbaikan signifikan dalam kesejahteraan pekerja (Good Stats, 2025). Situasi ini menjadi perhatian besar karena kualitas pekerjaan yang rendah dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja Indonesia.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan selama ini. Apakah kebijakan ini benar-benar mampu menekan angka pengangguran yang ada, atau justru memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat? Kesenjangan pendapatan dapat berpotensi memperburuk masalah sosial yang pada akhirnya menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan tersebut menjadi semakin serius apabila kita melihat pola distribusi manfaat pembangunan yang selama ini cenderung tidak merata.

Perlu adanya pendekatan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga mengarah pada pemerataan manfaat ekonomi secara adil. Di sinilah ekonomi syariah dapat menjadi acuan alternatif yang menawarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan sosial. Ekonomi syariah dengan instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf menyediakan mekanisme redistribusi kekayaan yang transparan dan etis, sekaligus memupuk solidaritas sosial. Pendekatan ini dapat menjadi solusi untuk memperbaiki distribusi sumber daya agar dapat mengatasi kesenjangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Dengan memahami tantangan dan peluang tersebut, tulisan ini akan mengulas kritik terhadap kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025, menganalisis potensi dampaknya terhadap pengangguran dan kesenjangan, serta mengusulkan bagaimana integrasi ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk mewujudkan distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

PEMBAHASAN

Kebijakan fiskal yang diterapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun 2025 menunjukkan langkah yang terukur dalam menjaga defisit anggaran pada tingkat yang relatif aman, yakni sekitar 2,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan defisit APBN mencapai Rp 479,7 triliun hingga Oktober 2025. Angka tersebut jauh lebih rendah dari angka yang diproyeksikan yaitu 2,45%–2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (CNBC Indonesia, 2025). Hal tersebut dapat diartikan sebagai komitmen dalam menjaga APBN agar lebih efektif.

Pendekatan kontra-siklus seperti penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank BUMN, penyaluran bantuan sosial tambahan, perbaikan sistem perpajakan dan penagihan tunggakan pajak merupakan strategi tepat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tantangan internal, seperti inflasi dan perlambatan ekonomi (Bisnis.com, 2025). Namun, penciptaan lapangan kerja yang sebagian besar berupah rendah mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal ini belum sepenuhnya berhasil dalam menjawab masalah kualitas pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini menjadi sorotan penting karena aspek pemerataan adalah kunci bagi pembangunan yang inklusif dan stabil sosial.

Meskipun keberhasilan menjaga defisit dan stabilitas sangat penting, fokus utama pemerintah seharusnya lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas lapangan kerja, bukan hanya kuantitasnya. Kebijakan yang lebih agresif perlu diarahkan kepada sektor padat karya dengan upah layak dan perlindungan sosial yang memadai agar pekerja bisa menikmati peningkatan kesejahteraan. Pendekatan fiskal yang hanya menstimulasi ekonomi tanpa adanya fokus distribusi yang jelas berisiko memperlebar kesenjangan sosial yang justru mengancam stabilitas jangka panjang.

Penerapan dan pengoptimalan instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan sedekah yang terorganisir dan terintegrasi dengan sistem fiskal nasional mempunyai potensi besar sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk menangani kesenjangan sosial. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi ekonomi syariah agar instrumen ini dapat berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki sistem birokrasi dan operasional pada lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat, wakaf, dan sedekah agar pengelolaan aset dan distribusi dana menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Literasi dan inklusi keuangan syariah juga perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berfokus pada wilayah dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Hal ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses modal usaha dan dukungan sosial secara etis dan berkelanjutan, serta membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat bawah.

Selain itu, kebijakan fiskal hendaknya lebih proaktif dalam memberdayakan sektor informal yang masih didominasi mayoritas pekerja Indonesia. Memberikan insentif fiskal dan kemudahan akses pada sektor ini dapat mendorong transisi dari informal ke formal, sehingga pekerja memperoleh perlindungan sosial, jaminan kesejahteraan, dan kesempatan pengembangan kapasitas yang lebih baik. Contohnya, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikolaborasikan dengan pelatihan literasi keuangan oleh pemerintah dan bank penyalur dapat membantu pelaku usaha informal meningkatkan kapasitas usahanya serta memudahkan mereka mengakses pembiayaan legal.

Oleh karena itu, integrasi program fiskal konvensional dengan ekonomi syariah harus diterapkan secara maksimal sebagai pendekatan komprehensif dalam mengatasi pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial ekonomi akan memperkuat sinergi ini, memperbesar dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan memastikan keberlanjutan pembangunan inklusif di Indonesia.

PENUTUP

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman dan mempertahankan stabilitas makroekonomi. Namun, penciptaan lapangan kerja yang sebagian besar berupa rendah dan dominasi sektor informal menandakan masih adanya tantangan serius dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada kuantitas pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas dan distribusi manfaatnya agar pembangunan bisa lebih inklusif.

Integrasi instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan sedekah yang dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan sistem fiskal nasional memiliki potensi besar sebagai solusi redistribusi kekayaan yang adil dan inklusif. Selanjutnya, penguatan literasi keuangan syariah serta pemberdayaan sektor informal melalui insentif fiskal dan akses pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan perlindungan sosial dan daya saing pekerja. Hal tersebut penting dilakukan agar kesenjangan sosial dapat diperkecil sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi kebijakan fiskal yang inklusif dan kolaborasi lintas sektor termasuk lembaga ekonomi syariah, Indonesia dapat mempunyai peluang besar untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial. Implementasi kebijakan yang efektif dan sinergis akan memperkuat fondasi ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara merata.

REFERENSI

- Bisnis.com. (2025, September). *Sederet Jurus Purbaya Genjot Ekonomi Kuartal IV/2025, Yakin Manjur?* Diambil kembali dari Bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20251104/9/1925902/sederet-jurus-purbaya-genjot-ekonomi-kuartal-iv2025-yakin-manjur#goog_rewarded
- CNBC Indonesia. (2025, November). *Breaking! APBN RI Defisit Rp 479,7 T di Akhir Oktober 2025*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251120145254-4-687058/breaking-apbn-ri-defisit-rp-4797-t-di-akhir-oktober-2025>
- CNBC Indonesia. (2025, oktober). *Terbaru! Utang Indonesia Tembus Rp 9.138,05 T*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251010100713-4-674642/terbaru-utang-indonesia-tembus-rp-913805-t>
- Good Stats. (2025). *Proporsi Pekerja di Sektor Informal Kembali Naik pada 2025*. Good Stats. Trading economics. (2025). *Tingkat Pengangguran Indonesia*. Trading economics.